

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Sekitar setahun setelah kemerdekaan Tajikistan tahun 1991, muncul konflik diantara kelompok yang menginginkan dijalankannya pemerintahan Islam di Tajikistan dengan kelompok pro Rusia. Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. PBB, Iran dan Rusia berusaha menjadi mediator diantara kedua kelompok tersebut.

Pertikaian antara kelompok pro Rusia dengan kelompok dengan kelompok muslim pada awalnya hanyalah merupakan konflik politik, dimana pada awal kemerdekaan Tajikistan, banyak sekali dominasi kelompok pro Rusia dalam pemerintahan. Konflik politik antara kelompok muslim dan kelompok pro Rusia tersebut kemudian berkembang menjadi perang sipil, yang mana pada intinya kelompok Muslim menginginkan keterlibatan dalam pemerintahan Tajikistan secara lebih besar.

Pada tanggal 27 Juni 1997, Presiden Tajikistan, Imamali Rahmonov, dan pemimpin pejuang Islam Negara tersebut, Abdullah Nur, menandatangani perjanjian damai di Moskow. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berakhirlah perang saudara di Tajikistan yang telah berlangsung selama lima

tahun. Berdasarkan perjanjian ini, 30 persen jabatan pemerintahan diberikan kepada kelompok Islam dan tentara Islam mereka diikutkan dalam militer Tajikistan. Selain itu, dilakukan pula amandemen terhadap UUD Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam. Islam merupakan agama mayoritas penduduk Tajikistan. Pengaruh Islam masuk ke Negara ini sejak abad ke-10.

Dibandingkan dengan Negara-negara lain di sekitar Tajikistan, Upaya damai yang dilakukan oleh dua kelompok yang bertikai ini cukup berhasil, hal itu bisa dilihat dari tidak adanya lagi pertikaian antara dua kelompok tersebut. Lain halnya dengan Negara tetangganya seperti Uzbekistan, meskipun beberapa upaya damai telah disepakati tetap saja konflik antara kelompok Islam dan pro Rusia belum bisa dipadamkan.

Realitas ini membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jelas lagi khususnya mengenai kelompok Muslim dan pro Rusia yang ada di Tajikistan tersebut sehingga mereka bisa hidup bersama dalam satu pemerintahan secara damai. Untuk itu maka penulis ingin meneliti dan mencari lebih dalam mengenai hal ini dengan mengambil judul **KONFLIK ANTARA KELOMPOK MUSLIM DAN PRO RUSIA PASCA KEMERDEKAAN TAJIKISTAN** sebagai judul dalam penelitian.

B. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki sejarah panjang di kawasan Asia Tengah, termasuk Tajikistan. Agama ini, telah hadir di sana sejak abad ke-7 melalui pedagang Arab. Sejak saat itulah, Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Asia Tengah. Saat ini penduduk Tajikistan berjumlah 6.163.506 penduduk, dimana 90 persennya adalah Muslim. Dari jumlah itu, 85 persen merupakan Muslim Sunni (lebih cenderung mau menerima perubahan) dan 5 persen adalah Ismaili/Shi'ah (kaku dan tidak mau menerima perubahan). Kebanyakan mereka tinggal di wilayah Gordo Badakhshan. Meski berbeda aliran, namun antara penganut Sunni dan Ismaili tidak pernah terjadi pertentangan. Keduanya hidup berdampingan secara damai serta sering mengadakan kegiatan keagamaan bersama. Tercatat ada sekitar 3.082 masjid di wilayah Tajikistan. Jumlah ini belum terhitung dari masjid yang dikelola oleh muslim Ismaili. Penganut Kristen berjumlah 235 ribu jiwa yang berasal dari etnis Rusia dan imigran. Mereka sebagian besar adalah penganut Kristen ortodok serta sejumlah kecil Kristen baptis, Katholik Roma, Advent, Protestan, Lutheran dan Saksi Jenovah. ¹ Secara keseluruhan penduduk Tajikistan terdiri dari beberapa etnis. Adapun komposisi etnis di Tajikistan

¹ . http://www.republika.co.id/suplemen/cetak_detail.asp?mid=5&id=17

0773&kat_id=105&kat_id1=147&kat_id2, di download tanggal 4 september 2009

terdiri dari etnis Tajik, Uzbek, Russian, Kyrgyz dan lain-lain. Namun demikian mayoritas penduduk Tajikistan berasal dari etnis Tajik.

Secara kesejarahan, Islam masuk ke wilayah Asia Tengah pada abad ke-7 Masehi. Bahkan selama kekuasaan khalifah di Madinah, pasukan Muslim mulai melakukan penetrasi ke tanah Rusia. Pada 642, misalnya, Azerbaijan telah berada di bawah kekuasaan Muslim. Setelah menaklukkan Kaukasia bagian timur (Qafqas), Islam mulai menyebar di wilayah tersebut tanpa hambatan. Serangkaian penetrasi terus berlangsung hingga abad kesepuluh, dan Islam menjadi agama yang populer di seluruh Asia Tengah.

Di tinjau dari sejarah politiknya, enam abad sebelum masehi, Bangsa Tajikistan telah berada di bawah Kekaisaran Khahamaneshian, Iran . Kemudian pada abad ke-9 masehi, pasukan muslim datang ke kawasan negara itu untuk membebaskan rakyat Tajikistan. Pada abad 19, intervensi pasukan Rusia mulai terasa di kawasan itu. Akhirnya, meskipun terdapat perlawanan sengit rakyat setempat, Tajikistan dimasukkan ke dalam wilayah Uni Soviet pada tahun 1917. Selama penguasaan Soviet, Tajikistan menjadi kawasan yang paling tertinggal dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Selama berada di bawah Uni Soviet pula, umat Islam dilarang menjalankan ibadah-ibadahnya.

Ketika negeri ini masih menyatu dengan Uni Soviet, kebebasan untuk menjalankan agama, khususnya Islam hamper-hampir tidak ada. Hal ini

dibuktikan oleh kebijakan Uni Soviet yang secara intern bersifat antagonistik terhadap Islam dan cenderung berusaha mematikan dan membasmi keyakinan agama. Pemerintahan Soviet juga melancarkan upaya yang tegas untuk menentang Islam sebagai sebuah agama yang terorganisir dan sebagai sebuah kekuatan yang berpengaruh di dalam urusan sosial dan kebudayaan.

Hal ini dibuktikan dengan tindakan Dewan Muslim Asia Tengah dan Kazakhstan yang selalu mengontrol peribadatan dan pengajaran Islam, mengatur Masjid-masjid, menunjuk imam untuk memimpin jamaah local dan mendikte isi ceramah dan praktek keIslaman. Tindakan ini dilakukan disebabkan karena agama dipandang sebagai penghalang bagi asimilasi warganya ke dalam kemasyarakatan Soviet. Uni Soviet secara resmi merupakan Negara sekuler dan tidak mengakui berbagai perkumpulan keagamaan dan hak-hak pemilikan properti organisasi Islam termasuk agam lainnya.

Hampir di seluruh wilayah Asia Tengah yang berpenduduk Islam, pemerintah Soviet menghadapi apa yang dinamakan “tantangan dan bahaya Islam”.² Fenomena fundamentalisme Islam banyak terjadi di Negara-negara dunia ke-3, di mana situasi politik, ekonomi dan social masyarakat di

² . A.H. Shahab, *Penindasan Islam di Uni Sovyet*, Center for Islamic Studies and Research, 1987, hal 21

dalamnya belum sepenuhnya stabil, di antaranya yaitu Yordania, Irak, Afganistan, Aljazair, Tajikistan dan Uzbekistan.

Di Tajikistan penguasa komunis melihat betapa bangsa Tajik semakin menampakkan identitas dan keIslamannya serta mengharapkan akan memperoleh kembali kemerdekaannya. Pihak Soviet menuduh kaum “nasionalis” dan “pan Islamis” dipimpin oleh Mullah-mullah “partikelir” melakukan kegiatan anti-Soviet dan menghina lembaga atheisme penguasa komunis. Dalam rangka membasmi kegiatan kebebasan mengutarakan keyakinan beragama, terutama Islam, banyak muslimin diseret ke pengadilan dan dimasukkan ke dalam penjara.

Pemerintah melarang masjid-masjid di buka, kecuali beberapa yang langsung dikuasai aparat intelejen komunis. Maka di Tajikistan pun, sebagaimana halnya di Khazakstan, warung-warung the dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk ibadah, diskusi agama dan da’wah Islamiyah.

Akhir tahun 1989, rezim Gorbachev berusaha meningkatkan toleransi antar umat beragama. Kebijakan ini kontan disambut gembira oleh penganut agama. Kegiatan riligijs pun meningkat. Sejumlah masjid baru dibuka. Pra juru dakwah dapat memulai lagi aktivitasnya dan mulai menyebar ke seantero negeri.

Transformasi politik di Moscow terjadi pada pada tahun 1990-an yang mengakibatkan runtuhnya Uni Soviet. Dengan runtuhnya Uni Soviet dan pecah menjadi negara-negara kecil, Tajikistan termasuk yang mempunyai harapan akan kebebasan menjalankan agamanya. Berbagai kawasan Uni Soviet, termasuk Tajikistan, beramai-ramai memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 9 September tahun 1991, Tajikistan memproklamasikan kemerdekaannya. Negara-negara baru yang terbentuk setelah Uni Soviet runtuh seperti republik-republik Baltik, Moldova, dan Georgia berupaya untuk mengklaim peralatan dan personil militer Soviet yang tersisa di negara mereka sebagai milik mereka. Namun hal ini tidak terjadi di Tajikistan. Pemerintah Tajik memilih untuk tidak mencoba membentuk angkatan perang sendiri tetapi memanfaatkan sisa-sisa kekuatan Soviet. Pemerintah Tajikistan untuk sementara waktu tetap mengesahkan kehadiran tentara Rusia untuk tetap tinggal di Tajikistan. Suatu perjanjian bilateral telah dicapai dengan Moscow yang meminta tentara reguler Rusia untuk tinggal di Tajikistan sampai 1999.³

Namun demikian ternyata proses kemerdekaan yang berlangsung di Tajikistan tidak berjalan mulus. Di kawasan ini, terjadi konflik internal yang

³ . <http://www.eisenhowerinstitute.org/programs/globalpartnerships/Securityandterrorism/coalition/regionalrelations/otherpubs/Khodjibaev.htm>,
di download tanggal 16 september 2009

sangat serius. Kemerdekaan yang diperoleh Tajikistan ternyata diikuti dengan persetujuan antara kelompok masyarakat di Tajikistan. Sekitar setahun setelah kemerdekaan Tajikistan dengan kelompok pro Rusia. Kelompok pro Rusia disini sebenarnya lebih mengarah pada kelompok non muslim. Seperti diketahui jumlah penduduk non muslim di Tajikistan sebenarnya tidak terlalu besar, yaitu kurang dari 235 ribu jiwa, namun kelompok non muslim ini meskipun berasal dari berbagai partai yang berbeda mendominasi kursi di Parlemen Republik Tajikistan. Adapun partai yang mendominasi di Parlemen Tajikistan adalah *People's Democratic Party of Tajikistan* (PDPT) yang memiliki suara 65% atau 84 kursi di Parlemen, *Tajik Communist Party* (CPT) 13% atau 16 kursi di Parlemen, *Islamic Revival Party* (IRP) 8% atau 10 kursi di Parlemen dan sisanya sebanyak 9 kursi adalah dibagi untuk partai-partai yang lebih kecil masing-masing 3 kursi untuk *Social Democratic Party of Tajikistan* (SDPT), *Socialist Party of Tajikistan* (SPT) dan *Tajik Communist Party*.⁴

Dari data tersebut terlihat bahwa kelompok Muslim yang sebenarnya merupakan penduduk mayoritas di Tajikistan justru hanya memiliki 2 kursi di Parlemen. Hal inilah yang juga menjadi pangkal kekhawatiran penduduk muslim akan kebebasan mereka menjalankan ajaran Islam di Tajikistan.

⁴ . <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ti.html>,

di download tanggal 20 november 2009

Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. Pada bulan Mei 1992, perseteruan meletus antara pemerintah yang didominasi oleh elit-elit komunis regional yang cenderung pro terhadap Rusia dari Khujand dan Kulob dengan kelompok Islam dan demokratis mewakili kebanyakan kaum-kaum Gharmi dan Badakhshani.

Perang saudara yang terjadi di Tajikistan hanya merupakan konflik yang terjadi antara pemerintah berkuasa dengan penduduk Muslim. Ketika Tajikistan merdeka masyarakat atau penduduk muslim Tajikistan menyambut baik kondisi tersebut. Hal tersebut mengingat selama masih berada di bawah Uni Soviet, umat Islam sangat dibatasi dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Untuk itu dengan merdekanya negara Tajikistan masyarakat muslim memiliki harapan dapat menjalankan ajaran agamanya secara bebas. Hal tersebut sebenarnya memang nampak ketika pada awal kemerdekaannya pemerintah Tajikistan mengumumkan mengenai kebebasan dalam menjalankan ajaran agama Islam di Tajikistan. Sebenarnya secara umum kelompok pro Rusia yang cenderung mendominasi pemerintahan Republik Tajikistan telah menjamin kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya di Tajikistan.

Namun demikian hal ini tidak berlangsung lama. Pada saat yang bersamaan terdapat isu dan anggapan dari sekelompok umat Islam Tajikistan yang menyatakan bahwa lambat laun umat Islam akan ditindas seperti pada

era Soviet dahulu. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya atau bahkan mayoritas pejabat pemerintahan masih di pegang oleh elit-elit lama. Bahkan dapat dikatakan bahwa umat Islam tidak memiliki wakil di pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan Tajikistan, muslimah diperkenalkan mengenakan jilbab. Namun, untuk dokumen resmi, foto diri dengan jilbab tidak diperkenankan. Dalam soal beribadah, muslimah juga mengalami pembatasan. Komite Ilmuwan Islamic Center di Tajikistan mengeluarkan pernyataan yang melarang muslimah yang ada di Negara tersebut datang ke masjid-masjid untuk beribadah atau mengikuti pelajaran agama. Kebijakan ini kontan menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga para tokoh agama.

Hal-hal inilah yang kemudian menimbulkan munculnya bibit-bibit konflik antara pemerintah berkuasa yang merupakan elit-elit pro Rusia dengan kelompok muslim. Pada awalnya konflik tersebut ditandai dengan demonstrasi anti pemerintahan yang dilakukan oleh kelompok muslim di Dushanbe pada bulan Maret 1992. Dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada pertengahan bulan November 1993 tersebut, sekitar 1000 pemberontak bersenjata menyerang Dushanbe dan juga kota kedua terbesar di Tajikistan yakni Khudzjant. Di kota-kota lainnya masyarakat muslim juga berhasil menduduki gedung-gedung pemerintah yang letaknya strategis. Enam orang anggota pasukan pengawal presiden meninggal dalam serangan di kota

Calovsk, di Tajikistan Utara. 14 orang lainnya meninggal di kota-kota lain. Para pemberontak dipimpin oleh komandan pasukan elit muslim, yang menentang para pemimpin yang berkuasa di pemerintahan Tajikistan yang dianggap akan menghalangi proses demokrasi di Tajikistan.⁵

Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. Pada bulan April 1992, setidaknya seorang tewas dan empat orang lainnya cedera ketika sebuah bom mobil meledak di jantung kota Tajik. Menurut seorang pejabat dari kementerian darurat Negara ledakan itu terjadi di luar kementerian darurat, dengan menghancurkan jendela-jendela dan merusak bagian depan gedung. Ledakan terjadi sebagai satu serangan. Dari data yang ada disebutkan bahwa orang yang tewas itu ternyata seorang pengemudi sedan buatan Rusia Volga yang sedang menunggu di luar gedung.⁶ Mobil itu rusak akibat ledakan tersebut dan sejumlah kendaraan lainnya mengalami kerusakan. Jika dikaji lebih jauh, memang ternyata kerusuhan dan perang sipil yang terjadi di Tajikistan lebih disebabkan sentimen masa lalu terutama jika menyangkut bekas Negara Uni Soviet. Ketegangan memuncak dan kemudian pada bulan Mei, bentrokan kecil terjadi

⁵ .<http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=1nd9811a&L=indonews&O=D&F=&S=&P=54138>, di download tanggal 10 maret 2010

⁶ .<http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=56949>, di download tanggal 10 maret 2010

antara dua kelompok yang bertikai tersebut. Dalam perang sipil tersebut mengakibatkan sebanyak kurang lebih 70 ribu korban jiwa.⁷

Sebenarnya secara umum kelompok Pro Rusia yang cenderung mendominasi pemerintahan Republik Tajikistan telah menjamin kebebasan bagi umat Islam untuk menjalankan ibadahnya di Tajikistan. Namun demikian karena pengalaman masa lalu Tajikistan ketika masih bergabung dengan Uni Soviet dan kebebasan menjalankan ajaran Islam sangat dibatasi, maka ada kekhawatiran dari kelompok-kelompok Islam di Tajikistan akan terulangnya hal serupa di era kemerdekaan Tajikistan. Untuk itu kelompok-kelompok Islam menginginkan wakil-wakilnya yang turut ambil dalam pemerintahan Tajikistan.

Pertikaian antara kelompok pro Rusia dengan kelompok muslim pada awalnya hanyalah merupakan konflik politik, di mana pada awal kemerdekaan Tajikistan, banyak sekali dominasi kelompok pro Rusia dalam pemerintahan. Konflik politik antara kelompok muslim dan kelompok pro Rusia tersebut kemudian berkembang menjadi perang sipil, yang mana pada intinya kelompok Muslim menginginkan keterlibatan dalam pemerintahan Tajikistan secara lebih besar.

Menghadapi dua kelompok yang sedang bertikai ini, pemerintah Tajikistan meminta Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik yang

⁷ .Michael E. Brown, *The International Dimensions of Internal Conflict*, The MIT Press, London, 1996, hal 6

sedang terjadi. Namun pada awalnya pemerintah Rusia menolak untuk ikut terlibat dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi. Rusia hanya mau terlibat dalam penyelesaian konflik atas nama misi dari PBB.

Intervensi Moscow (Rusia) di Tajikistan aktif dilakukan setelah 25 dari 48 orang pasukan Rusia pada satu pos terdepan perbatasan terbunuh pada pembersihan juli 1993 yang dilakukan oleh kekuatan oposisi Tajik. Presiden Rusia Boris Yeltsin menyatakan bahwa sepanjang perbatasan Tajik-Afghan, yang sebagian besar peperangan dipusatkan, merupakan perbatasan Rusia. Hal itu pulalah yang menjadi alasan Rusia untuk terlibat dalam upaya menstabilkan situasi di Tajikistan. Juru bicara Rusia juga mencatat pentingnya melindungi etnik Rusia yang tinggal di Tajikistan. Sepuluh ribu bala bantuan dikirim divisi pasukan senapan lengkap untuk bergabung dengan 5.000 pasukan pada Agustus 1993.⁸

Pada musim gugur 1993 Moscow dengan jelas dan secara terbuka mendukung pemerintahan Rakhmonov baik dari segi kemiliteran dan ekonomi. Ini adalah sebagai bagian untuk mengikis pengaruh Uzbekistan yang sedang berupaya menyebarkan pengaruh dan gerakan fundamentalisme islamnya. Dalam hal ini Rusia memberikan bantuan hampir dua kali sebanyak anggaran Tajikistan seperti pada akhir era Soviet. Meskipun begitu

⁸. "Ibid"

Rakhmonov tetap berupaya dan bersedia untuk melakukan pembicaraan dengan kelompok oposisi muslim untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Dalam konflik politik tersebut terdapat dua kelompok yang bertikai atau berkonflik yaitu antara kelompok Islam yang menamakan dirinya sebagai kelompok UTO (*United Tajik Opposition*) yang dipimpin oleh Said Abdullo Nuri dengan pemerintah Tajikistan di bawah pemerintahan Immamali Rahmonov. Dalam hal ini memang UTO merupakan atau dijadikan wakil dari masyarakat Islam di Tajikistan untuk memperjuangkan kepentingannya khususnya dalam upaya menghapuskan semua pengaruh Moscow (Uni Soviet) setelah Tajikistan merdeka. UTO sendiri terbentuk sebagai wadah dari masyarakat muslim yang merasa perlu untuk mengawasi atau mengontrol pemerintahan sehingga mereka merasa perlu untuk memposisikan diri dalam pemerintahan Tajikistan.⁹

Pembicaraan yang disponsori oleh PBB dimulai pada April 1994, tetapi kemajuan kecil dibuat sampai akhir 1996. Setelah Ibu kota Afghan, Kabul, jatuh ke tangan milisi Fundamentalisme Islam Taliban, negosiasi di Tajikistan berada pada suatu urgensi baru. Kesuksesan Taliban mengubah

⁹. Khodjibaev, Karim, "*Russian Troops and the Conflict in Tajikistan*", dalam

<http://www.eisenhowerinstitute.org/programs/globalpartnership/securityandterrorism/coalition/regionalrelations/otherpubs/khodjibaev.htm>, di download tanggal 8 maret 2010

keseimbangan kekuatan sepanjang perbatasan Tajik – Afghan dan lebih kurang membuat suatu solusi militer yang baik kepada konflik Tajik. Rusia, sponsor internasional pemerintah Rakhmonov, juga takut Taliban akan melanjutkan pergerakan ke-utaranya dan gerakan ke Tajikistan dan Uzbekistan, dengan tolakan ke belakang yang akan melemparkan seluruh pusat regional Asia ke dalam huru-hara. Taliban kemudian mengambil Mazar-i-Sharif di utara Afghanistan, dan untuk pertama kali di war post-Soviet, Moscow mengumumkan bahwa Moscow sedang mempertimbangkan mengirimkan pasukan untuk berperang ke luar negeri. CIS (Commonwealth of Independent States) juga mengeluarkan suatu komunike bersama yang memberi peringatan terhadap serbuan-serbuan Afghan pada perbatasan Tajik.¹⁰

Berkat campur tangan PBB serta bantuan Iran dan Rusia, kelompok-kelompok yang sedang bertikai bias dipadamkan. PBB, Iran, dan Rusia berusaha menjadi mediator di antara kedua kelompok tersebut yang akhirnya berhasil menyetujui penandatanganan perjanjian damai tahun 1997. Tanggal 27 Juni tahun 1997, presiden Tajikistan, Imamali Rahmanov, dan pemimpin pejuang Islam negara tersebut, Abdullah Nur, menandatangani perjanjian

¹⁰ .”*Perspektif Asia Tengah*”, Volume ii, Nomor 8, November 1997, Diterbitkan oleh, Pusat Studi Politik dan Strategi Eisenhower, dalam <http://www.eisenhowerinstitute.org/programs/globalpartnership/securityandterrorism/coalition/regionalrelations/otherpubs/khojibaev.htm>

damai di Moscow. Berdasarkan perjanjian ini, 30% jabatan pemerintahan diberikan kepada kelompok Islam dan tentara Islam mereka diikutkan dalam militer Tajikistan. Selain itu, dilakukan pula amandemen terhadap UUD Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam.¹¹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

Mengapa muncul konflik antara kelompok muslim dan kelompok pro Rusia di Tajikistan pasca kemerdekaan?

D. Kerangka Teori

1. Teori konflik

Terdapat beberapa definisi mengenai konflik yang dikemukakan oleh para ahli antara lain yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Hugh Miall dkk, yaitu :¹²

¹¹ . http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/kal_sejarah/masehi/

Juni/27 juni.htm, di download tanggal 6 november 2009

¹² . Hugh Miall dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, Jakarta, Hal 8

“Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan social yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan. Namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan pilihan. Satu kebiasaan dalam konflik adalah memberikan prioritas yang tinggi guna mempertahankan kepentingan pihaknya sendiri”.

Selain itu Proitt dan Rubbin mendefinisikan konflik sebagai berikut :¹³

“Conflict means perceived divergence of interest, or a belief that the parties current aspirations cannot be achieved simultaneously. (Konflik adalah persepsi/perasaan tentang perbedaan kepentingan atau kepercayaan yang aspirasinya tidak dicapai secara simultan)”.

Berdasarkan pada kedua pengertian tentang konflik di atas, maka dapat dikatakan bahwa konflik adalah suatu manifestasi dari adanya perbedaan kepentingan yang saling bertentangan antara satu kelompok dengan kelompok lain sebagai akibat tidak tersalurkannya aspirasi atau kepentingan dari salah satu kelompok tersebut. Adapun komponen-komponen dari konflik meliputi perbedaan pandangan atau ideology, politik, perbedaan agama, etnis

¹³ . Pruit, D and Rubin J, *Social Conflict : Escalation Stelemate and Settlement*, Random house, New York, 1986, hal 4

atau adanya perbedaan perlakuan dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Apabila konflik dikelola dengan baik atau diselesaikan tanpa kekerasan akan menghasilkan situasi yang lebih baik bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat, namun apabila konflik tidak dikelola dengan baik akan dapat terbentuk konflik terbuka dan bermuara pada munculnya kekerasan serta tindakan anarkhis.

Pada dasarnya terdapat beberapa jenis konflik, antara lain yaitu :¹⁴

1. Konflik Vertikal dan Horizontal

Dalam mencermati konflik yang telah berkembang dalam masyarakat, maka kita dapat melihat setidaknya dua level utama konflik yang terjadi yakni atas dan bawah atau dua dimensi utama, yaitu vertikal dan horizontal. Konflik vertikal atau “konflik ke atas” adalah konflik antara elit (pengambil kebijakan) dan masa rakyat. Konflik horizontal adalah konflik yang terjadi antara warga masyarakat, baik dipicu oleh masalah perebutan sumber daya alam ataupun SARA (masalah suku agama ras dan antar golongan).

2. Konflik Positif dan Konflik Negatif

¹⁴ . Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta 1992, hal 151-153

Konflik positif merupakan konflik yang tidak mengancam eksistensi system politik, yang biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Konflik negatif adalah konflik yang mengancam eksistensi sistem politik yang biasanya disalurkan melalui cara-cara non konstitusional, seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi.

3. Konflik Simetris dan Asimetris

Konflik simetris dapat dipahami sebagai konflik kepentingan antara pihak-pihak yang relatif sama. Sedangkan konflik yang tidak simetris dapat dilihat sebagai konflik kepentingan yang muncul diantara pihak-pihak yang tidak sama seperti konflik antara minoritas dan mayoritas, sebuah pemerintahan yang sudah mapan dengan sekelompok pemberotak.

4. Konflik yang Berwujud Kekerasan dan Konflik yang Tidak Berwujud Kekerasan

Konflik yang berwujud kekerasan, pada umumnya terjadi dalam masyarakat Negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan Negara dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Huru-hara (*riot*), kudeta, pembunuhan atau sabotase yang berdimensi politik (terorisme), pemberontakan dan separatis serta revolusi merupakan sejumlah contoh konflik yang mengandung kekerasan.

Konflik yang tak berwujud kekerasan pada umumnya dapat ditemui dalam masyarakat Negara yang memiliki konsensus mengenai dasar dan tujuan Negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Contoh konflik yang tak berwujud kekerasan, yakni unjuk rasa (demonstrasi), pemogokan (dengan segala bentuk), pembangkangan sipil (*civil disobedience*), pengajuan petisi dan protes, dialog (musyawarah), dan polemik melalui surat kabar.

Sebelum menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di Tajikistan khususnya ditinjau dari jenis-jenis konflik yang ditimbulkan, sebaiknya terlebih dahulu perlu untuk diketahui bagaimana realitas atau kondisi umum pemerintahan dan wilayah Tajikistan. Secara etnis seperti yang sudah diuraikan sebelumnya terdiri dari berbagai etnis yang meliputi etnis Tajik, Uzbek, Rusian, Kyrgyz dan lain-lain. Secara politik, pemerintahan Tajikistan berbentuk Republik dan terdiri dari beberapa partai politik yang mendominasi pemerintahan yang meliputi *People's Democratic Party of Tajikistan* (PDPT) yang memiliki suara 74% atau 49 kursi di parlemen, *Tajik Communist Party* (CPT) 10% atau 4 kursi di parlemen, *Islamic Revival Party* (IRP) 8% atau 2 kursi di parlemen.¹⁵ Ditinjau dari segi sosial masyarakatnya, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 3.187.000 penduduk, rata-rata bekerja di bidang pertanian 67,2%, industry 7,5% dan jasa 25,3%. Secara

¹⁵ . <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ti.html>, di download tanggal 20 november 2009

demografi wilayah Tajikistan berbatasan langsung dengan Afghanistan, yang berjarak 1,206 km, China yang berjarak 414 km, Kyrgyztan yang berjarak 870 km dan Uzbekistan yang berjarak 1,16 km.¹⁶

Dari berbagai jenis konflik tersebut di atas, maka konflik yang terjadi di Tajikistan juga dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis konflik di atas. Jika dilihat dari jenis konfliknya, konflik di Tajikistan dapat dikategorikan ke dalam jenis konflik vertikal, karena perang saudara yang terjadi merupakan konflik antara pemerintah yang didominasi oleh elit-elit lama yang sebelum Uni Soviet runtuh mereka menduduki pemerintahan (sehingga secara tidak langsung mereka merupakan orang-orang yang pro terhadap Rusia) dengan kelompok-kelompok Islam dan kelompok pro demokrasi yang merasa kepentingannya tidak diwakili di pemerintahan Tajikistan.

Meskipun demikian konflik di Tajikistan juga bisa dikategorikan sebagai konflik positif karena mekanisme penyelesaian yang terjadi disalurkan melalui kesepakatan damai sebagai akibat campur tangan PBB, Iran dan Rusia yang kemudian menghasilkan suatu kesepakatan bersama yang dikenal dengan perjanjian damai yang dilakukan di Moscow.

¹⁶ . *"Ibid"*

Konflik yang terjadi di Tajikistan juga bisa dikatakan sebagai konflik yang tidak simetris, karena konflik yang muncul merupakan konflik yang muncul di antara pihak-pihak yang tidak sama yaitu kelompok pro Rusia yang dalam hal ini merupakan kelompok yang mendominasi sistem pemerintahan di Tajikistan dengan kelompok Islam yang beranggapan tidak banyak dilibatkan di dalam pemerintahan Tajikistan.

Pada awalnya konflik sempat berwujud kekerasan karena konflik tersebut meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. Berdasarkan data diperoleh informasi bahwa terdapat 70.000 korban jiwa yang terbunuh akibat konflik yang terjadi di Tajikistan.¹⁷

Selain tingkatan konflik, untuk melihat seperti apa sebenarnya sebuah konflik terjadi dapat dilihat dari sumber-sumber yang menyebabkan terjadinya konflik. Terkait dengan konflik yang terjadi di Tajikistan, konflik ini dapat dikatakan sebagai konflik internal. Banyak para pembuat kebijakan dan jurnalis percaya bahwa penyebab konflik internal sebenarnya langsung dan sederhana. Dorongan-dorongan penggerak dibalik konflik-konflik kejam ini, disebut sebagai “kebencian masa lalu (*Ancient Hatred*)” yang saling dimiliki oleh banyak kelompok-kelompok etnis dan religius. Ditinjau dari sumbernya, konflik internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

¹⁷ . Michael E. Brown, *The International Dimensions of Internal Conflict*, The MIT Press, London, 1996, hal 6

1. Faktor-Faktor Struktural yang Meliputi :¹⁸

- Negara-negara lemah; Ketika struktur Negara melemah, konflik kejam sering mengikuti. Pemimpin-pemimpin regional menjadi independen dan memegang asset-aset militer. Kelompok-kelompok etnis mencari otonomi daerah dan bahkan mencoba membentuk Negara sendiri.
- Masalah keamanan dalam negeri; Ketika negara-negara lemah, kelompok-kelompok individu di dalam Negara merasa perlu untuk membela diri dari ancaman keamanan kelompok-kelompok lain.
- Geografi etnis; Negara-negara dengan etnik minoritas cenderung mudah terkena konflik dibanding yang lain. Kelompok-kelompok etnis yang akan mencari control atas teritori tertentu. Serangan-serangan langsung terhadap penduduk, serangan gerilya, pembersihan etnik, dan pembantaian ras (*genocide*) adalah hasilnya.

2. Faktor-Faktor Politik, yang meliputi :¹⁹

¹⁸ . "*Ibid*", hal 14-15

¹⁹ . "*Ibid*", hal 16-18

- Praktek-praktek diskriminasi institusi-institusi politik; Konflik internal terjadi ketika tekanan dan kekerasan dilakukan secara umum oleh Negara atau bila transisi politis sedang berjalan.
- Pengistimewaan ideologi-ideologi nasional; Konflik seperti ini terjadi ketika konsep nasionalisme etnis menonjol. Nasionalisme etnis menonjol bila institusi-institusi politik yang penting tumbang, ketika institusi-institusi tidak dapat memenuhi keperluan utama masyarakat, dan ketika struktur-struktur alternatif yang memuaskan belum tersedia.
- Politik dalam kelompok; Prospek kekerasan dalam Negara bergantung pada tingkat kedinamisan politik domestik atau dalam kelompok. Prospek kekerasan tersebut besar bila kelompok-kelompok baik kelompok yang berdasarkan politik, ideologi, keagamaan, atau kesukuan memiliki tujuan ambisius, pendirian yang kuat tentang identitas, dan strategi-strategi konfrontasi.
- Elit politik; Konflik etnis sering terjadi akibat provokasi para elit pada waktu masalah politik dan ekonomi dalam usaha untuk menolak penantang-penantang domestik. Adu domba etnis adalah alatnya, dan media masa dipekerjakan sebagai pendukung kuat dan cara-cara propaganda yang membuat tegang antar etnis.

3. Faktor Ekonomi/Sosial, yang meliputi :²⁰

- Masalah-masalah ekonomi; Pengangguran, inflasi, dan persaingan sumber daya, terutama tanah, membantu adanya frustrasi dan ketegangan sosial, dan dapat melahirkan konflik.
- Sistem diskriminasi ekonomi; Kesempatan ekonomi yang tidak seimbang, akses sumber daya seperti tanah dan modal, dan perbedaan standar kehidupan yang besar adalah tanda-tanda sistem-sistem ekonomi yang dianggap oleh anggota masyarakat yang dirugikan sebagai tidak adil dan mungkin haram.
- Percobaan dan kesengsaraan perkembangan ekonomi dan modernisasi; Proses perkembangan ekonomi, industrialisasi, dan pengenalan teknologi-teknologi baru, dipercaya dapat membawa bermacam-macam perubahan sosial yang luas. Hal ini dapat menyulut masalah karena kebutuhan akan partisipasi politik biasanya melebihi kemampuan system itu sendiri untuk merespon. Hasilnya ketidakstabilan dan kekacauan.

4. Faktor Kultural/Perseptual, yang meliputi :²¹

²⁰ . "*Ibid*", hal 18-20

²¹ . "*Ibid*", hal 20-21

- Diskriminasi kultural terhadap kaum minoritas (bentuk-bentuk diskriminasi kultural); Masalah-masalah tersebut termasuk ketidaksamaan kesempatan pendidikan, ketidakleluasaan penggunaan dan pengajaran bahasa-bahasa minoritas secara legal dan politis.
- Sejarah dan persepsi kelompok tentang diri mereka sendiri dan orang lain (sejarah kelompok yang problematis); Benar adanya bahwa banyak kelompok-kelompok memiliki kemarahan terhadap yang lain karena kejahatan dalam satu hal atau hal lain pada titik yang sama pada masa yang lalu. Beberapa “kebencian masa lalu” ini menegaskan dasar-dasar sejarah.

Dalam kaitannya dengan fenomena yang muncul di Tajikistan, kebebasan menjalankan syariat dan ajaran Islam baru bisa dirasakan oleh masyarakat ketika mereka menjadi Negara yang merdeka pada tahun 1991. Dengan runtuhnya Uni Soviet dan pecah menjadi negara-negara kecil, Tajikistan termasuk yang mempunyai harapan akan kebebasan menjalankan agamanya. Namun seiring dengan kemerdekaannya, ketika Presiden Immamali Rakhmanov berkuasa terjadi konflik di antara kelompok yang menginginkan dijalankannya pemerintahan Islam di Tajikistan dengan kelompok pro Rusia.

Jika dikaji lebih mendalam konflik yang terjadi di Tajikistan pada dasarnya merupakan konflik yang bersumber pada faktor politis dan kultural/perseptual. Hal tersebut dikatakan demikian karena pada awal kemerdekaan Tajikistan, Negara ini mengambil bentuk Negara republik mandiri yang merdeka dimana kelompok pro Rusia yang cenderung mendominasi pemerintahan republik Tajikistan. Padahal mayoritas penduduk Tajikistan beragama Islam. Hal ini tentu saja membawa kekhawatiran tersendiri dari kelompok muslim di Tajikistan secara keseluruhan. Kelompok muslim merasa khawatir jika pada akhirnya nanti kelompok pro Rusia ini secara perlahan-lahan akan menyebarkan kembali ideologi komunis yang jelas-jelas akan sangat bertentangan dengan ideologi muslim. Namun demikian sebenarnya pemerintah Tajikistan telah memberi kebebasan bagi kelompok muslim untuk menjalankan ibadahnya. Namun demikian karena pengalaman masa lalu Tajikistan ketika masih bergabung dengan Uni Soviet dan kebebasan menjalankan ajaran Islam sangat dibatasi, maka ada kekhawatiran dari kelompok-kelompok Islam di Tajikistan akan terulangnya kembali hal serupa di era kemerdekaan Tajikistan.

Secara politis, konflik ini muncul karena adanya keinginan dari kelompok muslim untuk menempatkan wakil-wakilnya untuk turut ambil bagian dalam pemerintahan Tajikistan. Karena pada awal pembentukan Negara republik Tajikistan, pemerintahan banyak didominasi oleh kelompok

non muslim. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya kelompok muslim hanya sedikit sekali yang terwakilkan atau menduduki kursi dalam parlemen. Pada tingkatan yang bersifat politis konflik tersebut terjadi dalam bentuk pertentangan di dalam pembagian kekuasaan yang terbatas adanya dalam kehidupan masyarakat. Kondisi ini dapat mendorong solidaritas ke dalam diantara sesama anggotanya.

Ditinjau dari sumber konflik yang terjadi di Tajikistan, pada dasarnya konflik yang muncul juga bersumber faktor kultural/perseptual. Konflik nilai disini jelas nampak karena adanya ketakutan dari kelompok muslim yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam bertentangan dengan kelompok pro Rusia yang *basic* awalnya atheis. Sedang secara kepentingan, masyarakat atau kelompok muslim akan merasa kepentingan-kepentingannya kurang terpenuhi atau terwakilkan dalam pemerintahan Tajikistan didominasi oleh kelompok non muslim. Hal ini memang banyak pula dipengaruhi oleh faktor kesejarahan kelompok muslim Tajikistan khususnya dan muslim di Asia Tengah pada umumnya ketika masih bergabung dengan Uni Soviet.

Pada tahun 1928 Muslim Rusia terasing dari saudara muslim lainnya, akibat kebijakan tersebut. Periode kekuasaan tangan besi yang berjalan dari 1928 hingga 1968 merupakan tragedi bagi Muslim Rusia. Namun tirani dan tindakan represif bukannya membuat semangat mereka padam. Mereka malah seperti mendapat “kayu bakar” untuk bangkit. Di seluruh wilayah muslim di

Rusia (kebanyakan di wilayah Asia Tengah, yang merupakan bagian kekuasaan Rusia) melakukan gerakan kemerdekaan. Salah satu gerakan terkenal adalah Basmachi Movement.²² Akan tetapi, gerakan tersebut tak berjalan mulus. Karena dilakukan secara parsial, maka pemerintah Rusia dapat meredam dengan mudah semua gerakan tersebut, dan Rusia mampu mengontrol kembali semua wilayah. Kemudian muncullah Uni Soviet yang menerapkan keseragaman untuk menganut atheisme sebagai ideologi Negara.

Hal itu kemudian berlanjut hingga tahun 1970 dan 1980-an. Para pemimpin Kremlin silih berganti menyerukan perlunya pembaruan upaya untuk memerangi agama, khususnya Islam. Upaya tersebut meliputi : pengalihan fungsi masjid guna keperluan secular, pemaksaan untuk meninggalkan identitas, tradisi dan cara pandang Islam, dan peningkatan propaganda bahwa Islam adalah agama terbelakang, percaya tahyul, dan identik dengan kebodohan. Serangan bersenjata terhadap umat Islam mulai merebak tahun 1979 seiring kampanye militer Soviet ke Afghanistan serta munculnya gerakan perlawanan di sejumlah Negara Asia Tengah. Bagaimanapun, peran Islam di dalam politik juga berhubungan dengan peristiwa yang tragis di Tajikistan sejak kemerdekaan.

²² . *"Ibid"*

E. Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang, permasalahan dan kerangka teori diatas, maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa konflik antara kelompok muslim dan pro Rusia di Tajikistan terjadi karena :

- Faktor politik dan ideologi, pemerintahan Tajikistan yang dikuasai oleh kelompok elit pro Rusia dianggap oleh kelompok muslim (yang berideologikan Islam) sebagai perpanjangan dari pemerintah Rusia (Soviet lama) yang berideologi komunis.
- Faktor kultural/perceptual, adanya kekhawatiran dari kelompok Muslim akan ketidakbebasan mereka dalam menjalankan ibadah atau ajaran Islam di Tajikistan seperti ketika masih bergabung dengan Uni Soviet.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian atau penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dimana dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka (*library research*), sehingga data yang dihasilkan berupa data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data oleh karena itu

pengumpulan data diambil dari buku-buku literature, laporan-laporan hasil penelitian, jurnal, majalah, dokumen, surat kabar, dan lain-lain (data sekunder) yang relevan dengan penelitian ini.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan alasan utama dilakukannya suatu penelitian, dimana hasil penelitian yang diperoleh berdasar pada kerangka berfikir ilmiah. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk :

- Mengidentifikasi dan mengkaji lebih dalam mengenai hal-hal yang melatar belakangi fenomena konflik di Tajikistan yang terjadi antara kelompok muslim dengan kelompok pro Rusia yang menduduki pemerintahan.
- Memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena munculnya konflik di Tajikistan dan perkembangannya pasca Perang Dingin yang akhirnya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama.

H. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dalam skripsi ini dimulai sejak tahun 1991 sampai pada perkembangan terakhir situasi politik di Tajikistan yaitu pada tahun 1997. Hal ini karena pada tahun 1991 Tajikistan merdeka dan jarak atau kurun waktu 1991 – 1997 muncul konflik antara kelompok muslim dan pro Rusia yang kemudian berakhir pada tahun 1997 dengan adanya perjanjian damai antara kelompok Muslim dan pro Rusia. Penulis juga akan menggunakan data di luar ketentuan waktu dan ruang lingkup jika dianggap perlu dan memiliki keterkaitan atau relevansi yang sangat erat dengan periode yang telah ditentukan, misalnya dimulai berakhirnya Perang Dingin sampai saat sekarang.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun pembahasan masing-masing bab meliputi :

BAB I Menjelaskan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka

pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II Gambaran umum Tajikistan dan awal konflik Kelompok Muslim dengan Kelompok Pro Rusia.
- BAB III Faktor politik dan ideologis sebagai pemicu konflik di Tajikistan.
- BAB IV Faktor kultural/perseptual sebagai pemicu konflik di Tajikistan.
- BAB V Kesimpulan mengenai konflik yang muncul di Tajikistan antara kelompok Muslim dan kelompok pro Rusia.